

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia yang memiliki tantangan perekonomian pasar bebas atas konsekuensi perkembangan perekonomian globalisasi, baik secara global maupun domestik menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Pemerintah dalam mengendalikan lini perekonomian nasional wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, disamping mengatur dan menjaga kelancaran sistem perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dikemukakan dalam substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa: “Pemerintah dalam implementasi pembangunan perekonomian nasional berkomitmen tegas dan konsisten akan kestabilan moneter, serta meningkatkan kinerja kerangka kebijakan moneter yang ditetapkan”.

Salah satu tantangan tersebut dikemukakan Kemenkeu (dalam Sudaryanto, dkk., 2014) sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat ketidakpastian perekonomian *ASEAN Economic Community* (AEC) yang memerlukan tiang-tiang perekonomian yang kuat dan saling berhubungan. Secara faktual, tantangan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari laporan tahunan perekonomian Bank Indonesia (BI) yang mengalami perlambatan pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir dapat dikemukakan bahwa secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tren yang terus menurun. Presentase Tingkat perekonomian menyusut kisaran rata-rata sebesar 6,11%, bahwa tingkat pertumbuhan sejak tahun 2018 menunjukkan tren yang terus menurun sebesar 6% dengan pengecualian tahun 2015 (4,6%).

Menurut *Wall Street Journal* (dalam lansiran *economy.okezone.com*, diakses pada 8 Januari 2021), salah satu persoalan yang membuat ekonomi melambat diketahui akibat mekanisme transmisi kebijakan moneter Indonesia yang ditandai

dengan ketidakmerataan pendanaan investasi dalam menentukan hasil pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disinyalir, terdapat ketimpangan cukup besar antar daerah yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan, baik dari Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Lebih lanjut, data yang dipublikasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016 (dalam lansiran *www.republika.co.id*, diakses pada 8 Januari 2021), bahwa realisasi investasi masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 53,6% (Rp. 328,7 Triliun) dari total 7% total wilayah di Indonesia, sementara output Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60% total output. Tentu hal demikian mengindikasikan bahwa konsentrasi pembangunan lebih unggul di Pulau Jawa dibanding wilayah lainnya. selanjutnya, PDRB tersebut dapat dipahami sebagai rata-rata tetimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, dimana suatu daerah memiliki kontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat. Besar kecil pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat berdampak pada kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri seperti pembangunan dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Kendati, APBD memiliki beberapa kelemahan, namun masih menjadi parameter untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah suatu daerah saat ini (Tangkilisan, 2007). Keberhasilan kemandirian keuangan daerah tersebut, tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) komponen utama dalam kemandirian keuangan daerah, yaitu pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.

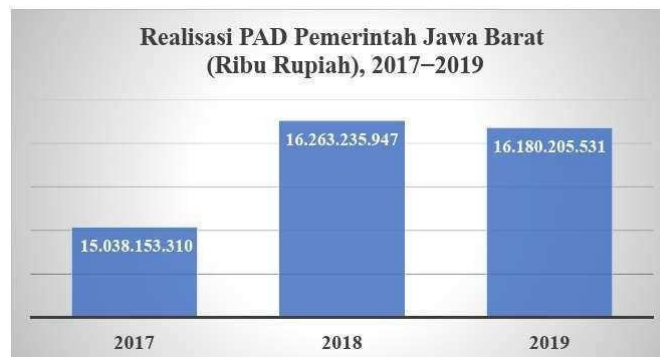
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, pada kenyataannya tidak semua daerah mampu membiayai pengeluaran daerah dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terjadi karena kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk aktivitas yang

menunjang perekonomian. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber- sumber pendanaan daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari sekian daerah di wilayah Indonesia yang memiliki kapabilitas strategis bagi kemandirian keuangan daerah. Hal demikian sebagaimana didasarkan pada hasil kajian ekonomi regional yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang dikategorikan cepat tumbuh dan maju di berbagai sektor dengan kontribusi PDRB sebesar 24,49% (BI, 2019), utamanya dalam pengembangan sumberdaya industri maupun pertanian, meliputi: IPTEK, dana, informasi dan kelembagaan. Peningkatan ini dapat dikemukakan secara umum, bahwa investor akan menghubungkan pemilihan lokasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah yang akan dituju.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dalam rentang 3 tahun dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Jawa Barat, 2017–2019

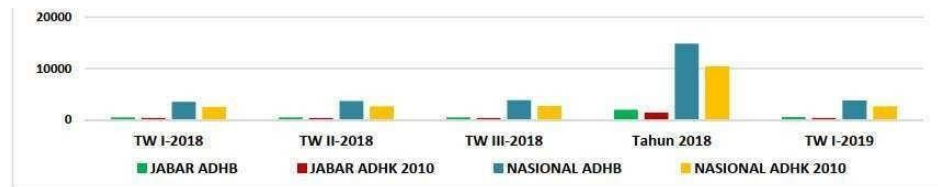


Sumber : <https://jabar.bps.go.id> (diolah, 2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dikemukakan bahwa tahun 2017 Provinsi Jawa Barat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15 triliun dan naik pada 2018 sebesar 16,26 triliun, namun tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun di angka 16,18 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik tiap tahun di Provinsi Jawa Barat dikarenakan memiliki sektor-sektor unggul penyumbang APBD yang dimungkinkan untuk lebih dikembangkan. Besar kecilnya APBD yang dimiliki suatu daerah sangat bergantung pada pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dalam menghasilkan barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi produktifitas masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari kesejahteraan tenaga kerja di suatu daerah dan tingkat pengangguran. Ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks, bukan saja karena menyangkut jutaan jiwa akan tetapi karena faktor demografisnya yang mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada pertumbuhan penduduk penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di setiap provinsi di Indonesia memperlihatkan keragaman. Fenomena yang tampak adalah pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tenaga kerja di setiap provinsi memiliki nilai upah yang berbeda – beda. Disinyalir, Provinsi Jawa Barat masih memiliki tingkat upah yang tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya nilai upah tersebut tentunya akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang lebih produktif dan menekan angka pengangguran.

Berikut adalah PDRB Provinsi Jawa Barat dalam rentang 2 tahun dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. PDRB Nominal Provinsi Jawa Barat 2018 dan 2019



Sumber : <https://jabar.bps.go.id>

Sejalan dengan Gambar 1.2. dikemukakan bahwa perekonomian Jawa Barat pada TW I-2019 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp509,87 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp361,52 triliun. Pada TW I-2019 ekonomi tumbuh 5,43% (yoy) melambat dibanding TW I-2018 yang tercatat sebesar 5,9% (yoy), namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,07%. Sedangkan Ekonomi Jawa Barat TW I-2019 terhadap triwulan sebelumnya naik 0,43% (qtq). Diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan tiap-tiap daerah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber ekonomi agar dapat meningkatkan produktifitasnya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor seperti pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran dan pengaruh dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah yang dihasilkan Provinsi Jawa Barat. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya analisis kemandirian kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah di tinjau dari aspek keuangan tahun anggaran 2017-2019, khususnya penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Maka dari itu, dalam tataran penelitian ini hendak mengkaji apakah ada pengaruh pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota, khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017- 2019?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017- 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemandirian keuangan daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017- 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu akuntansi pemerintahan, serta dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan (referensi) atau bahan kajian (pertimbangan) dalam pengambilan kebijakan atau meningkatkan kebijakan ekonomi daerah (regional) berdasar variabel pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah

pemerintah kabupaten/kota, khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi kinerja kegiatan investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan kontribusinya dalam perekonomian regional, khususnya bagi investor Provinsi Jawa Barat.